

**IMPLEMENTASI DAN EVALUASI PROGRAM KEMITRAAN  
DAN BINA LINGKUNGAN PT TIMAH TBK  
DI KABUPATEN BANGKA TAHUN 2019**

*<sup>1</sup>Putri Aisyah*

Universitas Bangka Belitung

Email: ssprsyh@gmail.com

*<sup>2</sup>Bustami Rahman*

Universitas Bangka Belitung

Email: bustami.rahman@gmail.com

*<sup>3</sup>Ibrahim*

Universitas Bangka Belitung

Email: iim\_babel@yahoo.com

**Abstrak**

Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) merupakan salah satu implikasi kebijakan publik yang bertujuan untuk mewujudkan tiga pilar utama pembangunan yang telah dicanangkan oleh pemerintah dan merupakan janji politik kepada masyarakat guna mengurangi jumlah pengangguran (*pro-job*), mengurangi jumlah penduduk miskin (*pro-poor*) dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi (*pro-growth*) di sekitar wilayah kegiatan operasional pertambangan. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan implementasi dan mengidentifikasi hasil evaluasi dari pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) PT Timah Tbk di Kabupaten Bangka pada tahun 2019. Penelitian ini menggunakan Teori Implementasi Kebijakan Publik milik Merilee S. Grindle yang menggagas implementasi kebijakan publik dapat diukur dari proses pencapaian hasil akhir (*outcomes*) yaitu tercapai atau tidaknya tujuan kebijakan yang ingin diraih. Selain menggunakan Teori Implementasi Kebijakan Publik milik Grindle, penelitian ini juga menggunakan Teori Evaluasi Kebijakan Publik milik William Dunn. Dunn menggambarkan bahwa evaluasi berkaitan dengan produksi informasi mengenai manfaat hasil kebijaksanaan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang sumber data primernya berasal dari wawancara tidak terstruktur dengan informan. Jumlah informan dalam penelitian ini adalah 18 orang terdiri dari 10 orang sebagai penerima bantuan program kemitraan atau mitra binaan dan 6 orang penerima bantuan program bina lingkungan serta 2 anggota pada unit kerja Divisi CSR Satuan Kerja PKBL PT Timah Tbk. Temuan penting dalam penelitian ini antara lain distribusi pembinaan yang tidak merata terhadap mitra binaan, lemahnya mekanisme monitoring serta disfungsi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

***Kata Kunci: Implementasi, Evaluasi, PKBL***

### **Abstract**

*The Partnership and Community Development Program (PKBL) is one of the implications of public policy which aims to realize the three main pillars of development that have been announced by the government and constitute a political promise to the community to reduce the number of unemployed (pro-jobs), reduce the number of poor people (pro-poor) and increase economic growth (pro-growth) around the area of mining operations. The purpose of this research is to describe the implementation and identify the results of the evaluation of the implementation of the Partnership and Community Development Program (PKBL) of PT Timah Tbk in Bangka Regency in 2019. The Theory used in this field is Merilee S. Grindle's Public Policy Implementation Theory, which initiates the implementation of public policies that can be measured from the process of achieving outcomes, namely whether or not the policy objectives to be achieved. Beside using Grindle's Theory of Public Policy Implementation, this study also uses William Dunn's Theory of Public Policy Evaluation. Dunn illustrates that evaluation is concerned with the production of information about the benefits of the results of wisdom. This research uses a descriptive qualitative approach, whose the primary data sources are from unstructured interviews with informants. The number of informants in this study was 18 people consisting of 10 people as recipients of partnership program assistance or fostered partners and 6 recipients of community development program assistance and 2 members of the unit CSR of the PKBL in PT Timah Tbk. The main findings that of the research are unequal distribution of guidance to fostered partners, weakness of the monitoring mechanisms and dysfunction of laws and regulation.*

**Keywords :** *Implementation, Evaluation, PKBL*

### **PENDAHULUAN**

Bisnis dan penguasaan atas eksploitasi pertambangan timah memiliki implikasi yang sangat besar terhadap kehidupan ekonomi dan lingkungan masyarakat khususnya sekitar daerah tambang. Eksplorasi komoditas timah yang sangat berharga ini telah mewarnai ratusan tahun periode perjalanan kehidupan sosial masyarakat di daerah ini. Banyak reaksi yang muncul dari berbagai kalangan maupun sudut pandang dalam menyikapi aktivitas pertambangan ini, terkhusus pemerhati lingkungan. Tanggung jawab sosial perusahaan menjadi penawar sekaligus penyeimbang bagi masyarakat di wilayah sekitar sebagai akibat dari kegiatan operasional perusahaan. Hal ini ditempuh untuk meminimalisir dampak negatif dari produksi timah dengan memfungsikan peran perusahaan tambang dalam memperbaiki lingkungan pasca tambang melalui Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan.

Program-program tanggung jawab sosial perusahaan atau yang lebih dikenal dengan *Corporate Social Responsibility* yang selama ini dijalankan oleh pihak perusahaan tambang belum mampu memberikan dampak yang signifikan bagi kesejahteraan dan kemandirian masyarakat disekitar areal tambang. Program yang lebih dominan memberikan bantuan yang lebih bersifat *charity* ataupun *philanthropy* semata daripada memberikan bantuan yang bersifat pemberdayaan. Sedang kebutuhan dan tuntutan

masyarakat berubah seiring waktu. Masyarakat menuntut adanya pemberdayaan bagi komunitasnya sehingga mereka bisa mandiri secara ekonomi.

Melalui Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) yang dicanangkan oleh pemerintah, tuntutan dan harapan masyarakat lingkaran tambang dapat terakomodasi. Program ini difokuskan pada pengurangan jumlah pengangguran (*pro-job*), pengurangan jumlah penduduk miskin (*pro-poor*) dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi (*pro-growth*) di sekitar wilayah kegiatan operasional pertambangan. Selanjutnya kebijakan ini tertuang dalam Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-02/MBU/7/2017 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan BUMN. PT Timah Tbk sebagai sebuah perusahaan milik negara yang bergerak di bidang pertambangan tidak luput dari implikasi kebijakan tersebut. PT Timah Tbk dituntut untuk turut andil memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah, koperasi dan masyarakat melalui Program Kemitraan dan Bina Lingkungan.

Sebagai sebuah kebijakan publik, pelaksanaan PKBL oleh BUMN tidak selalu berjalan dengan mulus. Hal ini disebabkan karena proses implementasi merupakan proses yang rumit dan kompleks. PKBL seidealnya haruslah memberikan manfaat berkelanjutan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat mengingat PKBL merupakan perwujudan tiga pilar utama pembangunan negara. Untuk itulah perlu dilakukan peninjauan dari kinerja program PKBL guna melihat relasi antara perusahaan tambang dengan pemangku kepentingan yang dalam hal ini adalah komunitas masyarakat lingkaran tambang yang menjadi target sasaran dari program tersebut. Tinggi rendahnya kinerja PKBL tidak mutlak akan menjamin baik-buruknya relasi perusahaan dengan masyarakat, namun dari kinerja ini terlihat bagaimana komitmen, kebijakan dan tindakan perusahaan terhadap masyarakat.

Pertanyaannya kemudian adalah bagaimanakah praktik program kemitraan dan bina lingkungan tersebut diimplementasikan. Disamping itu, untuk memastikan perusahaan telah melaksanakan program kemitraan dan bina lingkungan secara baik, maka diperlukan evaluasi terhadap program tersebut. Penelitian ini hendak melakukan analisa terhadap program kemitraan dan bina lingkungan dalam tataran implementasi serta evaluasinya.

## **METODE PENELITIAN**

### **Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan analisis data deskriptif untuk menggambarkan realita empiris dari implementasi dan evaluasi

PKBL yang dipraktikkan dalam perusahaan agar lebih mudah dipahami dengan cara mempertimbangkan nilai-nilai, norma, budaya, struktur organisasi dan perilaku tertentu yang terjadi pada lingkungan penelitian serta faktor-faktor eksternal lainnya yang mendorong dipraktikkan dan diungkapkannya kegiatan PKBL di Kabupaten Bangka.

### **Waktu dan Tempat Penelitian**

Waktu pelaksanaan penelitian dari bulan Desember 2019 hingga Juni 2020. Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Bangka dengan asumsi bahwa wilayah Kabupaten Bangka merupakan salah satu wilayah yang berada di Pulau Bangka yang terkenal sebagai sabuk timah dunia (*world's tin belt*) dan merupakan wilayah izin usaha pertambangan darat terbesar yang dimiliki oleh PT Timah Tbk di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yakni seluas 62.068,01 Ha. Hal ini seharusnya memungkinkan Kabupaten Bangka mendapat perhatian lebih besar dari PT Timah Tbk untuk melaksanakan program kemitraan dan bina lingkungan.

### **Subjek Penelitian**

Penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling* agar informan dipilih dengan pertimbangan dan tujuan tertentu yang benar-benar menguasai suatu objek penelitian. Adapun kriteria dan informan yang ditunjuk atau dipilih dalam penelitian ini adalah informan yang mempunyai kaitan erat dengan pelaksanaan kegiatan PKBL PT Timah Tbk. Dalam penelitian ini yang menjadi subjek penelitian adalah masyarakat Kabupaten Bangka dan juga anggota - anggota pada unit kerja Divisi CSR Satuan Kerja PKBL PT Timah Tbk.

### **Prosedur**

Penelitian ini dilakukan untuk menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Analisa dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif karena permasalahan yang dibahas berusaha mendeskripsikan secara jelas dan terperinci serta memperoleh data yang mendalam dari fokus penelitian. Pada penelitian ini penulis melewati tiga tahapan dalam penelitian yaitu pertama tahap deskripsi, dimana peneliti mendeskripsikan apa yang dilihat, didengar dan dirasakan. Peneliti baru mendata sepiintas tentang informasi yang diperoleh. Tahap kedua yaitu reduksi, dimana peneliti mereduksi segala informasi yang diperoleh pada tahap pertama untuk memfokuskan pada masalah. Terakhir, tahap seleksi, dimana peneliti menguraikan fokus yang telah

ditetapkan menjadi lebih rinci kemudian melakukan analisis secara mendalam tentang fokus masalah yang diteliti.

### **Data, Instrumen dan Teknik Pengumpulan Data**

Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung dari masyarakat yang dilakukan melalui proses wawancara, observasi dan lainnya dengan tujuan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan. Dalam penelitian ini, data primer yang dibutuhkan oleh peneliti diperoleh langsung dari sumber aslinya, melalui wawancara dengan berbagai informan baik staf PKBL PT Timah Tbk maupun penerima bantuan PKBL PT Timah Tbk periode 2019. Data sekunder merupakan data atau hasil penelitian yang diperoleh dari bahan kepustakaan berupa buku, dokumen dan lain-lain. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini berupa *Annual Report* PT Timah Tbk Tahun 2019 serta Laporan Keberlanjutan PT Timah Tbk Tahun 2019, data-data publikasi lembaga-lembaga berkompeten lainnya seperti BPS, pemberitaan media massa, serta hasil-hasil kajian, penelitian atau sumber-sumber lainnya dari perorangan, organisasi, perguruan tinggi dan lain sebagainya yang relevan.

Teknik pengumpulan data adalah sebuah teknik, cara atau proses yang digunakan untuk mengumpulkan bahan-bahan untuk penelitian. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu, wawancara, observasi dan dokumentasi. Proses wawancara dilakukan guna menggali informasi, tanggapan, pandangan, pengalaman dan pengetahuan dari pihak-pihak atau perorangan yang memiliki *concern* pemahaman atau kepentingan terkait dengan praktik PKBL. Observasi dilakukan di Kabupaten Bangka yang merupakan jumlah Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) darat (*onshore*) terluas PT Timah Tbk. Proses dokumentasi dilakukan sebagai upaya untuk mendapatkan data sekunder dari dokumen-dokumen yang memuat data dan informasi yang berkaitan dengan program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat. Dokumen-dokumen yang dimaksud berupa buku, laporan penelitian sebelumnya, berita dan artikel dalam media cetak.

### **Teknik Analisis Data**

Data hasil penelitian dianalisis menggunakan tiga komponen pengolah data, yaitu reduksi data, *display* data dan penarikan kesimpulan. Reduksi data merupakan proses memilih dan memilah data mentah yang didapatkan dari lokasi penelitian berupa wawancara, observasi serta dokumentasi. Proses *display* data menampilkan

data yang lebih sistematis dan telah diolah dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi. Setelah melakukan *display* data, tahap terakhir yang dilakukan adalah penarikan kesimpulan yang merupakan aktivitas analisis pengambilan keputusan dan mencari kesimpulan atas apa yang telah diteliti.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### A. Implementasi Program Kemitraan dan Bina Lingkungan

#### 1. Implementasi Peraturan Perundang-Undangan dalam Pelaksanaan PKBL

Pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan PT Timah Tbk telah berjalan dari tahun 2009 hingga sekarang yang pada dasarnya dilatarbelakangi oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003, Undang-undang No 40 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 dan Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-02/MBU/7/2017 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan BUMN. Komitmen Perseroan ditindaklanjuti dengan dituangkannya kebijakan *Corporate Social Responsibility* (CSR) atau Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan. Perseroan kemudian mengimplementasikan program CSR melalui Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-02/MBU/7/2017 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara.

PT Timah Tbk disisi lain juga menjalankan tanggung jawab sosial perusahaan dan lingkungan yang disebut sebagai *Corporate Social Responsibility* (CSR), dimana hal tersebut diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Dari kedua regulasi diatas, membuat PT Timah Tbk memiliki kewajiban melaksanakan CSR sekaligus melaksanakan PKBL, dimana secara praktik keduanya memiliki aplikasi program yang sama untuk kepedulian sosial dan lingkungan.

Hal yang menarik sebetulnya adalah baik program kemitraan, program bina lingkungan maupun program pemberdayaan masyarakat dalam praktiknya di lapangan oleh PT Timah Tbk berada dalam satu kerangka, yaitu CSR. Hal ini dibuktikan dengan PT Timah Tbk mengimplementasikan program CSR melalui Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) dan diarahkan pada program-program yang bersifat memberdayakan dan memberikan manfaat bagi masyarakat di lokasi sekitar Perseroan berkegiatan. Terutama para pelaku Usaha Mikro, Kecil

dan Menengah (UMKM) serta masyarakat yang termasuk dalam kategori ekonomi kurang mampu.

## 2. Pembinaan dan Pelatihan Lanjutan Bagi Mitra Binaan

Setelah menjadi mitra binaan PT Timah Tbk salah satu hak yang diperoleh oleh mitra binaan adalah mengikuti pembinaan. Pembinaan yang didapatkan oleh para mitra binaan meliputi pelatihan, pameran, *study tour* dan pendampingan. Tentunya untuk dapat mengikuti kegiatan pelatihan dan pembinaan tersebut ada persyaratan khusus yang harus dipenuhi oleh para mitra binaan.

*“Pelatihan itu diberikan kepada beberapa mitra binaan yang memiliki potensi pemasaran yang baik, yaitu dari segi kemasan, pelayanan serta peningkatan produksi. Semua mitra binaan punya peluang untuk itu (pelatihan dan pembinaan), tetapi yang diutamakan yang punya potensi dalam produknya. Kita menyelenggarakan pelatihan seperti pelatihan packaging dan pelatihan peningkatan produk kerajinan. Kita selalu memberikan motivasi agar dalam setiap proses produksinya baik dari mulai bahan baku, sistem produksi sampai dengan packingnya dilakukan sesuai dengan aturan yang sudah ditentukan oleh badan yang berwenang.”* (Bapak SS, Staf PKBL PT Timah Tbk, 29 Mei 2020).

Namun, hal berbeda dirasakan oleh AB, seorang mitra binaan asal Sungailiat yang juga merupakan seorang pengusaha tanaman hias. Dirinya mengakui selama bergabung menjadi mitra binaan PT Timah Tbk dari tahun 2019, belum pernah mendapatkan pelatihan apapun.

*“Enggak, belum ada itu saya ikut pelatihan juga belum ada. Hanya sekali mereka kesini itu waktu mau survei pertama. Selebihnya enggak ada. Mungkin ada pelatihan, tapi untuk orang-orang tertentu saja.”* (AB, mitra binaan asal Sungailiat, Kabupaten Bangka, 29 April 2020).

PT Timah Tbk tidak hanya melakukan penyaluran bantuan pinjaman bergulir semata, tetapi juga melakukan kegiatan pembinaan dan promosi produk dengan membantu melakukan pengenalan dan penjualan produk unggulan Mitra Binaan. Hal itu diwujudkan dalam bentuk pameran dan bazar UKM Mitra Binaan serta studi banding ke beberapa daerah untuk mengembangkan produk mereka.

Berdasarkan cuplikan wawancara dan observasi di lapangan yang dilakukan oleh peneliti terdapat bukti yang mengisyaratkan bahwa program pembinaan dan pelatihan tidak menyentuh seluruh mitra binaan. Hal tersebut diungkapkan seluruh mitra binaan yang menjadi informan pada penelitian ini. Begitupun halnya dengan pameran dan bazar UMKM. Pameran dilakukan sebagai ajang promosi untuk membantu pengusaha memasarkan hasil produksi usahanya. Namun, mitra binaan

belum memiliki kesempatan untuk ikut dibantu memasarkan produknya lewat acara pameran.

### 3. Monitoring Pelaksanaan PKBL

Monitoring secara spesifik memfokuskan penilaian pada hal tertentu saja seperti keadaan antar waktu saat program masih dalam proses implementasi. Monitoring dilakukan untuk memastikan implementasi dan alokasi *resource* berjalan sebagaimana rencana dan jadwal. Dalam melakukan monitoring, Unit PKBL PT Timah Tbk mengklaim telah melaksanakannya secara rutin terhadap perkembangan usaha para mitra binaan. Hal ini dilakukan untuk mengetahui perkembangan usaha sebagai konfirmasi atas mitra binaan yang dikategorikan macet dan bermasalah.

*“Monitoring kita lakukan dengan program terjadwal. Pelaksanaannya dilakukan dengan mengunjungi masyarakat. Kita tanyakan bagaimana perkembangan usahanya dan juga manfaat yang diterima oleh masyarakat seperti apa.”* (Bapak SS, Staf PKBL PT Timah Tbk, 29 Mei 2020).

Namun sayangnya, kunjungan yang dijadwalkan secara rutin tersebut tidak dirasakan oleh beberapa mitra binaan yang menjadi informan dalam penelitian ini. Mitra binaan asal Belinyu ini juga mengungkapkan bahwa dirinya belum pernah lagi dikunjungi setelah mendapatkan bantuan dana bergulir dari PT Timah Tbk.

*“Enggak ada kunjungan-kunjungan. Dulu waktu sebelum jadi mitra. Engga ngerti juga saya monitoring begitu. Taunya saya bayar aja sebelum jatuh tempo.”* (IF, mitra binaan asal Belinyu, Kabupaten Bangka, 28 April 2020).

Berdasarkan wawancara diatas, diketahui bahwa evaluasi yang dilakukan oleh PT Timah Tbk adalah monitoring yang dilakukan secara rutin dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan seputar perkembangan usaha mitra binaan. Namun, seperti yang dijelaskan diatas sebelumnya bahwa monitoring yang dijalankan pun masih belum maksimal. Sehingga informasi terkait evaluasi yang dilakukan juga masih minim.

Dalam melakukan monitoring pada program bina lingkungan, unit PKBL PT Timah juga melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan pada program kemitraan. Berdasarkan wawancara dan observasi yang dilakukan, diketahui hasil monitoring pada program bina lingkungan hampir sama dengan hasil monitoring pada program kemitraan, yaitu masih minimnya kegiatan monitoring yang

dilakukan. Berdasarkan skema mekanisme penyaluran PKBL BUMN diketahui bahwa penyaluran bantuan program bina lingkungan tidak mengharuskan adanya monitoring dan pendampingan sebagaimana yang diwajibkan pada program kemitraan. Dalam bina lingkungan, monitoring sekaligus evaluasi dilakukan dengan membuat laporan pertanggungjawaban dana yang telah disalurkan kepada penerima bantuan.

## **B. Evaluasi Program Kemitraan dan Bina Lingkungan**

### 1. Disfungsi Peraturan Perundang-Undangan Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan

Pengimplementasian Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan PT Timah Tbk yang berdasar pada Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-02/MBU/7/2017 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan BUMN juga dibarengi dengan pelaksanaan program CSR yang berdasar pada Undang-undang No 40 Tahun 2007. Kegiatan CSR ditujukan untuk memberikan kontribusi kepada masyarakat di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan lingkungan hidup. CSR dilaksanakan untuk mendukung kegiatan operasi PT Timah Tbk dan perolehan proper dari berbagai unit operasi. Sedangkan kegiatan Kemitraan dan Bina Lingkungan dibagi kedalam dua kegiatan, yaitu Bina Lingkungan yang fokus pada bantuan pendidikan, bencana alam, pembangunan sarana ibadah, olahraga dan peningkatan kesehatan masyarakat serta Kemitraan yang berfokus dengan memberikan modal usaha, pembinaan dan ekspansi akses pasar bagi pengusaha kecil. Kedua program tersebut nampak memiliki tujuan yang sama. Namun, karena penggunaan istilah yang berbeda serta diatur dalam peraturan yang berbeda, maka menimbulkan tumpang tindih dalam pelaksanaannya dan juga menimbulkan beberapa persoalan.

Pelaksanaan CSR maupun PKBL oleh BUMN sama-sama diwujudkan dalam bentuk bantuan sosial dan *community development*. Sehingga BUMN yang melaksanakan CSR dan PKBL memiliki beban ganda untuk biaya dan pekerjaan yang sama. Sehingga dapat dikatakan PT Timah Tbk mengeluarkan biaya yang berlipat pula dan beban kerja ganda dalam melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Bagi dunia usaha, ketidakjelasan ini menimbulkan resiko berupa pengeluaran biaya yang tentu akan mengurangi proyeksi laba. Apabila tidak ditangani dengan baik, maka hal ini akan menurunkan insentif bagi bidang usaha untuk melaksanakan kegiatan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Bahkan,

terbuka penafsiran internal perusahaan dengan memilih program yang lebih menguntungkan dan sejalan dengan tujuan perusahaan. Sehingga tujuan sejati tanggung jawab sosial dan lingkungan tidak akan tercapai.

## 2. Distribusi Pembinaan yang Tidak Merata

Program pembinaan dapat dikatakan sebagai hal yang penting dalam program kemitraan. Program pembinaan inilah yang memiliki peran krusial dalam peningkatan kualitas UMKM melalui pelatihan, pameran, *study tour* maupun pendampingan. Namun, pelaksanaan program pembinaan yang dilakukan oleh PT Timah Tbk dapat dikatakan kurang efektif karena tidak semua mitra binaan diberikan pembinaan eksklusif berupa pembinaan dalam pengelolaan usaha ataupun pelatihan penyusunan laporan keuangan meskipun sebenarnya pembinaan dan pelatihan semacam ini merupakan salah satu hak yang diterima oleh mitra binaan. Hanya mitra binaan yang memiliki keunggulan dan potensi pada produknya, seperti kemasan, pelayanan maupun peningkatan produksi yang memiliki kesempatan untuk dibina dan dibantu promosi produknya oleh perusahaan.

Hal ini sejalan dengan pernyataan seluruh mitra binaan yang diwawancarai sebagai informan bahwa mereka belum pernah mendapatkan pelatihan maupun pembinaan dari perusahaan. Sampai sekarang pola kemitraan berjalan dengan bentuk yang beragam dengan melibatkan sejumlah mitra bisnis UMKM. Secara konseptual, kemitraan melalui BUMN diwujudkan dengan pengalokasian dana pendampingan dan pembinaan BUMN terhadap sejumlah kelompok usaha dalam teritorial tertentu tempat kelompok usaha berada.

Namun, penguatan usaha mikro seharusnya dilakukan oleh lembaga yang memang sangat memahami tipikal usaha mikro, bagaimanapun BUMN tidak akan bisa maksimal dalam melakukan pembinaan terhadap usaha mikro karena itu bukan bidang mereka. Agar program kemitraan ini optimal, maka BUMN harus membina sesuai dengan bisnis yang digelutinya sehingga ada relasi dalam kemitraan. Mitra BUMN tidak sesuai dengan sektor bisnisnya, padahal pembinaan terhadap BUMN tidak terbatas pada manajemen, tetapi juga peningkatan kualitas produk dan akses pasar.

Hal inilah yang sepertinya menjadi penyebab pembinaan dan pelatihan yang dilakukan oleh PT Timah Tbk belum maksimal. Sehingga untuk menjalankan pembinaan dan pelatihan diperlukan persyaratan dan ketentuan khusus bagi mitra

binaan seperti melakukan pembayaran cicilan dengan tepat waktu atau memiliki potensi produk yang potensial dan menjanjikan. Mengingat kemampuan kewirausahaan yang dimiliki oleh mitra binaan yang mendapat bantuan dari PT Timah Tbk akan berpengaruh terhadap keberhasilan perusahaan dan citra perusahaan.

### 3. Lemahnya Mekanisme Monitoring

Metode monitoring yang dilakukan oleh PT Timah Tbk monitoring kunjungan lapangan, yaitu mengunjungi lokasi usaha mitra binaan untuk mengetahui perkembangan pemasaran, penambahan omzet ataupun tenaga kerja. Kunjungan juga seharusnya dilakukan secara terjadwal dengan rutin. Monitoring juga seharusnya dilakukan pada program Bina Lingkungan, dimana Unit PKBL PT Timah Tbk melakukan kunjungan saat monitoring program kemitraan dan melakukan pengecekan mengenai bagaimana pemanfaatan sarana dan prasarana umum yang telah diberikan.

Dalam menjalankan dan mengelola program kemitraan, fenomena yang kerap terjadi adalah kurang tepatnya dalam penyaluran dana bantuan yang diberikan, adanya bantuan yang tidak terealisasi dan jumlah pinjaman bermasalah semakin meningkat atau adanya pinjaman yang macet setiap tahun. Berdasarkan penelusuran peneliti, seluruh informan dalam penelitian ini tidak pernah bermasalah dalam melakukan pinjaman dan selalu membayar tepat waktu bahkan sebelum jatuh tempo.

Sayangnya masih ditemukan penyimpangan dari pelaksanaan PKBL PT Timah Tbk terkait proses monitoring. Hal ini terjadi dikarenakan tidak dilakukannya monitoring secara berkala dan intensif oleh perusahaan terhadap mitra binaan. Beberapa mitra binaan mengakui tidak pernah ada monitoring yang dilakukan setelah mendapatkan pinjaman dana bergulir, namun beberapa diantaranya mengakui pernah dikunjungi satu kali setelah mendapatkan pinjaman dana bergulir untuk melihat perkembangan usaha mitra binaan.

Tahap monitoring atau pengawasan bertujuan untuk melihat perkembangan usaha para mitra binaan. Sekurang-kurangnya terdapat tiga jenis monitoring yang dilakukan meliputi *reminding call*, kunjungan lapangan dan pengisian lembaran perkembangan usaha. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa tahapan monitoring belum maksimal dilaksanakan oleh PT Timah Tbk karena tidak semua

dan hampir tidak ada informan dalam penelitian ini sebagai mitra binaan yang mendapatkan *reminding call*, kunjungan lapangan maupun pengisian lembaran perkembangan usaha. Hal ini terjadi mungkin disebabkan oleh keterbatasan waktu, frekuensi dan tenaga serta sumber daya pihak PT Timah Tbk miliki.

## **SIMPULAN DAN SARAN**

### **Simpulan**

Dari hasil penelitian yang dilakukan kepada staf PKBL maupun pengusaha yang telah menjadi mitra binaan mengenai proses pelaksanaan PKBL PT Timah Tbk terdapat beberapa hal yang menjadi catatan penting. Pertama, pengimplementasian Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan PT Timah Tbk yang berdasar pada Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-02/MBU/7/2017 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan BUMN juga dibarengi dengan pelaksanaan program CSR yang berdasar pada Undang-undang No 40 Tahun 2007. Kedua program tersebut nampak memiliki tujuan yang sama. Namun, karena penggunaan istilah yang berbeda serta diatur dalam peraturan yang berbeda, maka menimbulkan tumpang tindih dalam pelaksanaannya dan juga menimbulkan beberapa persoalan.

Kedua adalah distribusi pembinaan yang tidak merata. Hanya mitra binaan yang memiliki keunggulan dan potensi pada produknya, seperti kemasan, pelayanan maupun peningkatan produksilah yang memiliki kesempatan untuk dibina dan dibantu promosi produknya oleh perusahaan. Padahal pembinaan dan pelatihan merupakan hak bagi setiap mitra binaan. Hal ini kemudian menjadi pekerjaan rumah yang cukup besar bagi PT Timah Tbk.

Ketiga adalah proses monitoring dengan metode kunjungan lapangan yang tidak dilakukan secara berkala dan intensif, beberapa pengusaha bahkan mengakui bahwa monitoring hanya dilakukan pada saat survei lapangan untuk mendaftar sebagai calon mitra binaan PT Timah Tbk.

### **Saran**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan serta kesimpulan yang menjadi jawaban akhir peneliti, maka beberapa saran yang diharapkan menjadi kontribusi penting adalah pertama, istilah, konsep, ruang lingkup dan mekanisme penerapan PKBL dan tanggung jawab sosial dan lingkungan dalam berbagai peraturan

perundang-undangan harus jelas sehingga tidak memunculkan penafsiran dan arti yang berbeda-beda.

Kedua, perlu adanya optimalisasi pelaksanaan PKBL oleh PT Timah Tbk dalam melakukan penyaluran, pemantauan dan pembinaan kepada mitra binaan, agar tujuan untuk menciptakan usaha yang tangguh dan mandiri serta pemberdayaan kondisi sosial masyarakat dapat tercapai dengan baik dari waktu ke waktu.

Ketiga, mitra binaan yang belum mendapatkan pembinaan dari pihak PT Timah Tbk harus lebih aktif untuk mendatangi dan meminta kesempatan mengikuti pelatihan ataupun pameran untuk mengembangkan usahanya mengingat hal tersebut merupakan hak dari mitra binaan.

## TENTANG PENULIS

Saya adalah Putri Aisyah, anak keempat dari empat bersaudara. Lahir pada tanggal 14 Oktober 1998 di Kota Pangkalpinang. Saya adalah Alumni dari SMA N 1 Pangkalpinang tahun 2016. Saat ini saya sedang melanjutkan pendidikan Strata Satu Jurusan Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Universitas Bangka Belitung. Email: [ssptrsyh@gmail.com](mailto:ssptrsyh@gmail.com) , Facebook: Putri Aisyah, Instagram: @ptrsyh14

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Akbar, Muh. Firyal dan Widya Kurniati Mohi, 2018: *Studi Evaluasi Kebijakan (Evaluasi Beberapa Kebijakan di Indonesia)*, Ideas Publishing, Gorontalo.
- Grindle, Merilee S., 2017: *Politics and Policy Implementation in the Third World*, Princeton Legacy Library Edition 2017, Princeton University Press, New Jersey.
- Kurniati, Rahmatullah Trianita, 2011: *Panduan Praktis Pengelolaan CSR (Corporate Social Responsibility)*, Samudra Biru, Yogyakarta.
- Purwanto, Erwan Agus dan Dyah Ratih Sulistyastuti, 2015: *Implementasi Kebijakan Publik Konsep dan Aplikasinya di Indonesia*, Gava Media, Yogyakarta.
- Rahman, Bustami dan Ibrahim, 2009: *Kisi-kisi Praktis Menyusun Proposal Penelitian*, UBB Press, Pangkalpinang.
- Suharto, Edi, 2010: *CSR & COMDEVI Investasi Kreatif Perusahaan di Era Globalisasi*, Alfabeta, Bandung.

Suharto, Edi, 2014: *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*, PT Refika Aditama, Bandung.

Suparno, 2017: *Implementasi Kebijakan Publik Dalam Praktek*, Dwiputra Pustaka Jaya, Sidoarjo.

Tachjan, 2006: *Implementasi Kebijakan Publik*, Penerbit AIPI, Bandung.

Wibisono, Yusuf, 2007: *Membedah Konsep & Aplikasi CSR*, Fascho Publishing, Gresik.

### **Jurnal, Skripsi dan Tesis**

Aini, Nurul dan Dasim Budimansyah, 2016: *Kemandirian Masyarakat Bangka dalam Pengembangan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Studi Kasus pada PT Timah Pangkalpinang Kepulauan Bangka Belitung)*, Jurnal Moral Kemasyarakatan, Vol. 01, No. 02, Universitas Pendidikan Indonesia.

Anggraini, Ria, 2011: *Implementasi Program CSR PT Timah (Persero) Tbk Terhadap Masyarakat Tani Desa Gemuruh Kecamatan Kundur Barat Kabupaten Karimun*, Universitas Riau.

Apituley, Efron Gisyard, 2012: *Pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) PT Telkom dengan Menggunakan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Berpola Klaster (Studi Kasus pada Mitra Binaan PT Telkom, Kube 115, Kampung Anyar, Kabupaten Bogor)*, Universitas Indonesia.

Budimanta, Arif, dkk, 2007: *Corporate Social Responsibility Alternatif Bagi Pembangunan Indonesia*, Indonesia Center for Sustainable Development, Jakarta.

Fajar, Mukti dan Reni Budi Setyaningrum, 2017: *Pelaporan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan serta Corporate Social Responsibility Badan Usaha Milik Negara*, Jurnal Media Hukum, Vol. 24 No. 2, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Hayat, 2018: *Buku Kebijakan Publik*, Universitas Islam Malang.

Imronah, 2009: *Implementasi Kebijakan: Perspektif, Model dan Kriteria Pengukurannya*, Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Sultan Fatah Demak.

Kawengian, Debby dan Joyce Jacinta Rares, 2015: *Evaluasi Kebijakan Pencegahan dan Pemberantasan Perdagangan Manusia (Tafficking) Terutama Perempuan dan Anak di Kabupaten Minahasa Selatan Provinsi Sulawesi Utara*, e-journal "Acta Diurna" Volume IV. Nomor 5.

Laporan Tahunan 2019 *Annual Report: Collaborative and Innovation* PT Timah Tbk.

Laporan Keberlanjutan 2019 *Sustainability Report: Strong Shining Reach New Hope*, PT Timah Tbk.

- Luciana, Endah Dwi, 2019: *Pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) dalam Upaya Pemberdayaan Usaha Kecil di Lampung (Studi pada PT Jasa Raharja (Persero) Cabang Lampung)*, Universitas Lampung.
- Prayogo, Dody, 2011: *Evaluasi Program Corporate Social Responsibility dan Community Development Pada Industri Tambang dan Migas*, Makara, Sosial Humaniora, Vol. 15, No. 1, Universitas Indonesia, Depok.
- Priyanto, Agus, 2012: *Rent Seeking dalam Pengawasan Pertambangan Kabupaten Mojokerto*, Jurnal Politik dan Manajemen Publik, Volume III, Nomor 1, Universitas Yudharta, Pasuruan.
- Retnaningsih, Hartini, 2015: *Permasalahan Corporate Social Responsibility (CSR) Dalam Rangka Pemberdayaan Masyarakat*, Jurnal Aspirasi Vol. 6 No. 2, Pusat Pengkajian, Pengelolaan Data dan Informasi (P3DI), Sekretariat Jenderal DPR RI.
- Santoso, Purwo, 2010: *Modul Pembelajaran Analisis Kebijakan Publik*, Research Center for Politics and Government, Jurusan Politik dan Pemerintahan, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Solihah, Ratnia, 2016: *Pola Relasi Bisnis dan Politik di Indonesia Masa Reformasi: Kasus Rent Seeking*, Jurnal Wacana Politik Volume I, Nomor 1, Universitas Padjadjaran.
- Tiara, Sheila Mirah dan Wenny Setiawati, 2013: *Studi Perbandingan Peraturan Corporate Social Responsibility di Negara Indonesia Dengan Negara Australia dan Inggris*, Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia.
- Triyono, Agus, 2014: *Pemberdayaan Masyarakat Melalui Community Development Program POSDAYA (Pos Pemberdayaan Keluarga) PT Holcim Indonesia Tbk Pabrik Cilacap*, KomuniTi, Vol. VI, No. 2, Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Widayanti, Sri, 2012: *Pemberdayaan Masyarakat: Pendekatan Teoritis*, WELFARE, Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial, Vol. 1, No. 1.